

# **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado**

**Valery Manoppo**

**Very Y. Londa**

**Alden Laloma**

*Abstract : Design This study is being used in a descriptive method derives Researchers want to describe give elaborate on how the implementation of waste management policy in East kecamatan wanea District Government of the State, with the face of data collection is done by interview give documentation. This is Reported in Research Vice give subdistrict head wanea, Head 5 (five), Head 4 (empathy) give the Community. Results showed realization give waste management program in kecamatan wanea State in 2014 in 4 (empathy) District of running properly, Environmental cleanliness program's budget from the central government, namely the Ministry of Internal Affairs of Manado City. Implementation of policy initiatives dominated give more initiative from the Central Government (Top Down). wanea district Government, giving it more community empowerment practicing general education as well as specialized as well as an evaluation of the implementation of the policy of the Government in the implementation of the waste management program. Then, in order to obtain the existence of political support from all elements of society and the social party political.*

## **Pendahuluan**

Menciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman dan bersih adalah merupakan hakekat dari suatu kehidupan manusia yang bertujuan agar kehidupan di antara semuanya maupun dengan lingkungan alam. Kebersihan lingkungan di artikan sebagai suatu kualitas lingkungan hidup yang bersih,sehat,indah atau bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia (Hidayat P. Tri, 2012). Masalah sampah merupakan masalah yang sangat kompleks dan erat di kaitkan dengan tata kehidupan manusia, baik kehidupan perorangan maupun lingkungan masyarakat. Di

indonesia, sejak tahun 1978 kebersihan lingkungan suatu daerah menjadi fokus, prioritas serta perhatian pemerintah dengan memasukan masalah lingkungan hidup dalam reperita III.

Manado adalah ibukota provinsi Sulawesi Utara,sejak Tahun 2006 mulai membuat dan memberlakukan berbagai kebijakan peraturan daerah kota manado. Kota manado terus mengalami perubahan dan perkembangan pembangunan secara fisik dari kota, sedangkan perkembangan menuju kota maju dan modern diikuti dengan bertambahnya populasi jumlah

penduduk. Dalam mempertahankan lingkungan yang bersih, namun seperti kota-kota lainnya di dunia dan nasional sebagai kota propinsi.

Kota Manado terus mengalami perubahan dan perkembangan pembangunan secara fisik dari kota sedang berkembang menuju kota maju dan modern diikuti dengan bertambahnya populasi jumlah penduduk, di mana sampai dengan bulan september 2007 penduduk kota Manado 533 ribu jiwa yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Permasalahan sampah merupakan faktor utama mempengaruhi tingkat kebersihan sebuah kota termasuk kota Manado. Sementara faktor bertambah jumlah penduduk diikuti pula dengan bertambahnya perkembangan dan pembangunan kota Manado juga turut mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat pada akhirnya ikut berdampak pada bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Melihat bertambahnya jumlah produksi sampah sebagai faktor utama mempengaruhi tingkat kebersihan lingkungan kota Manado, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan kebersihan, dalam hal ini penanganan dan pengelolaan sampah. Dilakukan secara serius, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan sinergitas kerja dan koordinasi mulai pemerintah kota Manado sampai tingkat pemerintahan di bawahnya.

Sejak awal tahun 2000, keseriusan pemerintah kota Manado meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan kebersihan dalam hal ini sampah,

dimana setiap lingkungan mendapatkan 1 (satu) unit motor pengangkut sampah sehingga terdapat 60 (enam puluh) unit motor sampah yang tersebar pada 60 (enam puluh) lingkungan di kecamatan Wanea yang di simpan dan dikelola langsung oleh kepala lingkungan.

Memberdayakan fungsi kepala-kepala lingkungan selain sebagai administrator pemerintah dilingkungannya membantu kepala kelurahan secara teknis setiap hari, pada pukul 16.00-18.00 Wita ikut aktif membantu menjemput dan mengangkat sampah-sampah rumah tangga menggunakan motor untuk selanjutnya sampah yang telah di angkat dana atau sudah terbungkus plastic di bawah ke tempat pembuangan sementara (TPS) di kelurahan masing-masing.

Untuk selanjutnya pada pukul 04.00-06.00 sudah diangkut oleh buruh/petugas Harian Lepas (PHL) yang di upah pemerintah kota Manado, menggunakan mobil truk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Kelurahan Sumompo.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian kita akan tertuju pada siklus kebebasan itu sendiri, meskipun hal itu tidak harus berjalan secara linier dan kaku. Dalam konteks ini, dapat di pahami ketika Lineberry (1978) dalam putra, (2001 : 78) berpendapat bahwa kebijakan tidak akan berhasil, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Yang paling banyak adalah yang bersifat bukan perjanjian internasional (non self-executing), artinya kebijakan negara perlu di wujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahwa mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Jones,1996 : 293-294). Dalam hal ini, perlu adanya kehati-hatian karena ketidak jelasan kebijakan dalam undang-undang adalah sebab utama kegagalan pelaksanaannya.

Pendapat tersebut di atas dibenarkan oleh ( Nugroho 2004:158) dengan menegaskan bahwa perencanaan atau konsep kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Bahwa kontribusi konsep kebijakan mencapai 60% dari keberhasilan, khususnya di zaman sekarang ini, di mana data dan informasi tentang masa depan pun sudah bisa diakses hari ini. Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik. Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (desein and dasollen). Secara etimologi kata kebijakan berasal dari kata bijak yang dalam kamus umum indonesia diartikan sebagai : pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Jadi seseorang yang di katakan

bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya.

Dengan cara ini kebijakan menyalurkan dari anggota organisasi sehingga pemikiran itu sejalan dengan tujuan organisasi. Kebijakan juga muncul dengan tidak resmi dan pada tingkat lebih rendah dalam organisasi yang berasal dan seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama dilalukan pada jangka waktu tertentu. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah di keluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, berdasarkan kedua pertanyaan tersebut di rumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap birokrasi dan pelaksana
- 4 Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja atau pelaksana.

Keempat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya, meliputi empat kompone yaitu : staf yang cukup jumlah dan mutu, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan

keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

### **Pengertian Kebijakan publik**

Istilah kebijakan berasal dari kata bahasa Inggris "Policy". Merupakan sebuah kata yang dalam implementasinya bisa di gunakan secara luas atau makro atau secara sempit atau terbatas ruang lingkungannya (Mikro). Rusli (2013) menjelaskan bahwa secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu "Program" sebagai wujud konkret atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan tersebut. Dalam rangka memecahkan masalah maka ada beberapa tahap penting dari proses kebijakan. Dunn (2002) menyebutkan adanya lima tahapan penting dari proses kebijakan publik, yaitu :

(1). Tahap penyusunan agenda kebijakan : merupakan tahapan yang dilakukan untuk merumuskan masalah kebijakan, mendefinisikan masalah kebijakan, dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

(2). Tahap Formulasi kebijakan : merupakan tahapan yang dilakukan

untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan.

### **Implementasi Kebijakan**

Dari teori-teori diatas, dapatlah didefinisikan implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, yang bersifat berhasil atau aplikabel untuk menghasilkan output dan outcomes sesuai yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan implementasi kebijakan sebagai : "*Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form the commandments or the decision-making important executive or judicial bodies or decision*) artinya implementasi kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dari kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pengertian implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan sampah adalah suatu cara, tindakan ataupun kegiatan yang disusun, ditetapkan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk

mencapai tujuan yaitu kebersihan, keindahan lingkungan lingkungan wilayah pemerintahannya.

### **Dimensi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn and Wiliam N. (1981), dimensi implementasi kebijakan publik berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan publik, yang secara teoritis terdiri dari 4(empat) hal yaitu :

1. Tahap-tahap kebijakan publik yaitu penetapan agenda kebijakan.
2. Analisis kebijakan yaitu pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikikasi alternatif,seleksi alternatif dan pengusulan alternatif.
3. Implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini bagaimana administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan mengintrepretasikan hingga menerapkan kebijakan yang lelah melalui seleksi
4. Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksudkan agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan.

Menurut Dunn and Wiliam N. (1981) Implementasi kebijakan pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) model yaitu :

1. Model Prospektif
2. Model Retrospektif
3. Model Integratif

Ada beberapa teori menurut para ahli, untuk dapat digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik yaitu :

1. teori menurut Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Menurut teori Van Meter dan van Horn (Subarsono, 2010;99) menjelaskan ada 6 faktor.

- a. Standard kebijakan dan sasaran ialah apa hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud jangka pendek dan jangka menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas yang saling berelaborasi kearah tujuan kebijakan yang dicapai.
- b. Sumber Daya ialah sumber daya manusia.
- c. Komunikasi ialah komunikasi dari setiap pemangkut kebijakan program.
- d. Karakteristik ialah dari para agen (unit atau sub unit).
- e. Keterlibatan lingkungan sosial,ekonomi dan politik.
- f. Sikap atau Disposisi ialah sikap disposisi

2. Teori Menurut G. Shabbir Cheeman dan Dennis A. Rondinelli (1983) ada 4 (empat) faktor :

- a. Kondisi Lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program

3. Teori Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Ter diri 3 faktor :

- a. Karakteristik masalah
- b. Karakteristik Kebijakan
- c. Variabel Lingkungan.

## **Pengelolaan Sampah**

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (1994) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya yaitu lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Pengelolaan dan pengangkutan sampah pengumpulan sampah adalah menjadikan tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau industri yang menghasilkan sampah.

Mekanisme sistem atau, cara pengangkutan untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya dapat dikelola oleh masing-masing keluarga.

Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat-tempat sampah yang besar dan dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara.

Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat.

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Manusia dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap ruang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Sadar atau tidak dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut, manusia akan menghasilkan limbah padat atau disebut juga sampah. Sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik ini bersifat dapat terurai maupun tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga langsung dibuang ke lingkungan (Nandi 2005).

Sistem pengelolaan sampah adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan berbagai bidang. Perencanaan pembangunan

perkotaan mempertimbangkan semua aspek terkait. Selain itu, memberi peluang bagus semua pemegang kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan (Damanhri2007).

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, pengelolaan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan bagi kita dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah kita mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan kita olah dan daur ulang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan pendekatan kualitatif berorientasi pada orientasi teoritis, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan bagaimana cara Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado.

### **Fokus Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode yang di gunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan wanea kota manado. Yang di fokuskan ada beberapa factor yang merupakan syarat utama keberhasilan Implementasi Kebijakan sebagaimana yang di kemukakan teori Edwards III yaitu :

- a. Komunikasi, hal ini menyakuti proses penyampaian informasi
- b. Sumberdaya yang meliputi empat komponen yaitu : staf yang cukup jumlahnya dan informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan.
- c. Sikap birokrasi atau pelaksana (disposisi) merupakan komitmen pelaksana terhadap program.
- d. Struktur organisasi termasuk tata aliran atau pelaksana.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang di gunakan di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari para informan yang di tetapkan sedangkan data skunder merupakan data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain (Collin Finn,1997).

Salah satu dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu meningkatkan jumlah atau banyaknya informan atau sampel responden, tetapi yang lebih penting ialah konten, relevans, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi.

## **Teknik Pengumpulan data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, dalam penelitian kualitatif penelitian merupakan instrument utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini di gunakan Teknik sebaik mungkin. (Egon G.Guba, 1985 dalam Nasution, 2001).

1. Wawancara (Interview)
2. Studi Documentar
3. Observasi

## **Metode Analisis Data**

Data yang di kumpul dalam penelitian ini diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan/ perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan kegiatan reduksi data ini langsung.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam proses pengumpulan data dan informan baik melalui wawancara dengan informan maupun melalui pengamatan langsung ke objek penelitian didapatkan hasil penelitian yaitu deskripsi atau gambaran umum kecamatan dan rangkuman hasil wawancara.

### **Deskripsi atau gambaran umum kecamatan wanea kota manado**

- a. Sejarah berdirinya kecamatan wanea  
Wanea merupakan nama satu kecamatan di kota manado. Kecamatan ini termaksud berada di jalan utama pusat kota.

Wanea adalah salah satu jenis burung celepek atau burung hantu. kebudayaan diabadikan oleh para pemukin awalnya sebagai nama lokasi tempat tinggal.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang mengacu pada fokus penelitian ini guna mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan wanea kota manado.

### **a. Komunikasi**

Proses penyampaian informan, kejelasan dan konsistensi informan yang disampaikan menjadi fokus pertanyaan yang di sampaikan responden untuk memastikan apakah setiap informan yang di sampaikan oleh pemerintah dapat diterima dengan jelas dan apakah yang di informasikan itu dilaksanakan secara konsisten atau tidak.

### **b. Sumberdaya**

Aspek sumberdaya ialah menggali sampai sejauh mana dukungan sumber daya manusia lainnya member dukungan terhadap kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea.

### **c. Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Disposisi)**

Sikap atau disposisi merupakan komitmen pelaksana terhadap program dalam hal ini adalah komitmen pemerintah kota manado maupun pemerintah kecamatan serta kelurahan dalam menjaga kebersihan kota.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas penduduk serta perubahan pola konsumsi penduduk, kontribusi terbesar yang mempengaruhi kualitas kebersihan lingkungan adalah praktek dari individu atau sekelompok masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya atau TPS, diikuti membangun kotoran hewan dan manusia (jamban) di aliran sungai atau selokan, yang pada akhirnya kualitas ekosistem lingkungan menjadi tidak bersih, kotor serta tidak sehat (Menurut Hidayat P.Tri, 2012).

Berdasarkan fakta dan kenyataan diatas, menurut hasil wawancara dengan semua informan baik dari unsur pemerintah (camat, sekretaris kecamatan, lurah-lurah). Kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea, setelah adanya kelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dan pemerintah kota manado melalui dinas kebersihan dan pertamanan kota manado kepada pemerintah kota manado.

Sementara bila melihat tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk Bersama-sama membantu pemerintah kecamatan wanea selaku implementor kebijakan sudah nyata terlihat partisipasinya. Untuk mengimplemetasikan kebijakan public tentang pengelolaan kebersihan dikecamatan wanea setiap pemangku kebijakan atau stake holders berperan serta aktif ikut pengelolaan kebersihan.

## **KESIMPILAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas, dapatlah di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea kota manado mengacu atau berdasar pada peraturan Walikota Manado Nomor 13 tahun 2016
2. Pemberlakuan peraturan Walikota Manado Nomor 13 tahun 2016 tentang kewenangan pengelolaan kebersihan ke kecamatan wanea kota manado.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea bila di lihat dari empat aspek yaitu standar kebijakan dan sasaran, komunikasi, serta aspek sikap atau disposisi.

### **Saran**

Dari Kesimpulan di atas dapat di berikan saran kepada pemerintah kota manado yaitu :

- a. Dapat di tingkatkan dalam menjaga lingkungan sekitar agar tidak ada smpa yang berkeliaran di mana-mana
- b. Jam operasi pengangkut smpa harus di atur dan harus ada kerja sama dari masyarakat agar membuang smpa pada tempatnya
- c. Tidak membuang smpah di selokan atau di gorong-gorong yang ada.
- d. Pemerintah lebih disiplin dalam melihat masyarakat untuk tidak membuang smpah sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian R. Nugraha, 2009, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*, Bekasi: Alumni.

Artiningsih, Ni Komang Ayu, 2008, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Semarang: Jurnal Fakultas Hukum UNDIP.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT.Remaja Rosada Karya.

Rahadyandan Widagdo A.S, 2002, *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*, Jakarta: Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan Di Propinsi DKI Jakarta.

Teguh Kristiyanto, 2008, *Pengelolaan Sampah*, Semarang: Jurnal Magister Pembangunan Wilayah & Kota Universitas Diponegoro.

Wardana, W.A., 2004. *Dampak pencemaran lingkungan*. Cetak keempat.penerbit Andi,Yogyakarta

Yulista G,M, Suryaningsih dan D.Rostyaningslh2012. *implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan (sampah) di kota semarang*.Skripsi. Jurusan Administrasi publik. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dipanegoro,Semarang

Sumber lain-lainnya :

1. undang-undang RI nomor 04 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup

2. Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
3. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Lingkungan kesehatan
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
5. Peraturan daerah Kota Manado (Perwako) Nomor 13 tahun 2016 tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan sampah dari pemerintah melalui kebersihan dan pertamanan Kota Manado kepada pemerintah kecamatan-kecamatan
6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 tahun 2006tentang pengelolaan persampahan dan Retribusi Jasa Umum.